



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PELAYANAN PUBLIK
KOMISI II DPR RI DI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 6 MARET 2019**

I. Pengantar

Kunjungan spesifik di Kabupaten Bekasi untuk melihat sejauhmana proses pemerintahan, terkait pelayanan publik, dan permasalahan pemerintahan. Kunjungan tersebut untuk meninjau sekaligus membahas persoalan pelayanan publik dilakukan di Kantor DPMPTS Kabupaten Bekasi. Pertemuan di Kantor Bupati Bekasi tersebut untuk membahas masalah pelayanan publik dan permasalahan lain yang terkait pelayanan seperti, perekaman KTP el, dan pelayanan pertanahan oleh Kantor BPN Kab. Bekasi.

II. Hasil Kunjungan Dengan Bupati Bekasi

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Asisten 1 Pemkab Bekasi. Drs. Carwinda, MSi kemudian dilanjutkan perkenalan dengan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan oleh Ketua Tim Kunspek Dr. Mardani yang diwakili oleh Drs. Tamanuri dan perkenalan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek.

Sambutan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Sambutan Plt Bupati Bekasi yang disampaikan oleh Asisten 1 Tata Pemerintahan Drs. Carwinda, MSi menyampaikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Bekasi merupakan tantangan tersendiri karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sehingga perlu mendapat perhatian semua pihak terutama pemerintah pusat dan khususnya Komisi II DPR RI seabgai mitra dari pemerintah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut dengan gembira kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi agar dapat melihat secara langsung kegiatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sambutan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Sambutan Tim Kunspek yang disampaikan Drs. Tamanuri, MSi mengatakan perkembangan Kabupaten Bekasi yang sangat cepat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan PNS dalam pelayanan publik adalah keniscayaan. Untuk itulah pentingnya kunjungan kerja ke pemerintah kabupaten Bekasi agar bisa memberikan masukan yang berguna dalam rapat kerja dengan para mitra terkait. Untuk itu kami persilahkan dinas terkait pelayanan memberikan pemaparan.

Paparan DPMPTSP Kab. Bekasi

Sekretaris DPMTSP Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa setelah kasus Meikarta yang menimpa pimpinan Kabupaten Bekasi, DPMPTSP telah melakukan perubahan-perubahan. Hal tersebut agar dengan penyatuan seluruh perizinan ke DPMPTSP, sehingga tidak ada lagi perizinan dilakukan oleh dinas teknis. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat untuk mempercepat pelayanan publik. Termasuk diantaranya adalah sudah dilaksanakannya Online Single Submission di Kabupaten Bekasi.

Namun demikian dalam pelaksanaan perizinan tersebut tentu ada hambatan, pertama hambatan eksternal, masyarakat keberatan dengan sistem on line, hal tersebut karena masyarakat merasa belum tahu bagaimana sistem tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka DPMPTSP membentuk tim 13 yang memberikan fasilitasi penggunaan on line. Selain hal tersebut DPMPTSP melakukan kerjasama dengan para pengembang kawasan industri di Bekasi dan kementerian terkait untuk memberikan sosialisasi perubahan perizinan yang berbasis online. Sehingga masyarakat memahami dengan perubahan regulasi tersebut.

Selain hambatan tersebut, ada juga hambatan dari internal, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemkab Bekasi melakukan pendidikan dan latihan yang bergantian diantara pegawai di DPMPTSP. Pegawai DPMPTSP ikut diklat teknis selama 3 hari untuk ikut pelatihan secara bergantian. Untuk mengatasi hal ini kami sudah menyampaikan ke Kemenpan RB untuk meningkatkan SDM di DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Untuk pemberlakuan OSS kami menghadapi kendala dengan adanya SOPnya karena dalam SOP tersebut dikatakan bahwa izin yang diajukan harus selesai dalam waktu 2 hari, sementara untuk approval dengan mitra kami BPN dibutuhkan 10 hari, bagaimana bisa menyetujui perizinan tersebut dalam waktu 2 hari. Untuk memperlancar perizinan maka kita kerjasmaa dengan ATR/BPN, dan melakukan pembahasan atas keluhan dan permohonan usaha agar bisa dalam 2 hari bisa diselesaikan paling tidak dalam 10 hari dapat disampaikan ke pemohonan. Untuk

memperlancar proses komunikasi maka tim 13 memberikan jawaban ke mereka terkait perizinan. Setelah pemberlakuan OSS perizinan yang masuk 18.000 pemohon.

Pelayanan juga kerjasama dg KPK supaya on track. Dan tim 13 di back office mengecek tiap hari agar keluhan-keluhahan dapat diselesaikan. Ada juga kendala terkait perizinan teknis karena secara SDM kami masih menunggu advice dari dinas teknis. Untuk itu kami telah melakukan studi banding. Salah satunya ke DIY, ternyata mereka advice teknis dilakukan oleh pihak ke 3 untuk mempercepat perizinan. Untuk kami sedang membahas dan membuat regulasi bagaimana hal itu bisa diterapkan di DPMPTSP.

OSS yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sebenarnya membuka jalan agar para pengusaha dapat semakin mudah mengurus perizinan. Namun sayangnya belum semua kementerian memberikan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sebagai syarat perizinan usaha. Belum adanya NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) tersebut jadi kendala pemberlakuan OSS

Selain hal tersebut kami juga menghadapi persoalan Surat Layak Fasilitas (SLF), yang sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2007, dan jadi prasyarat jadi perpanjangan izin untuk klinik kesehatan agar klinik tersebut dapat kerjasama dg BPJS. Dengan pemberlakuan OSS, maka klinik-klinik tersebut apabila belum mendapat SLF maka kerjasama dengan BPJS dapat diputus. Sedangkan untuk mendapatkan SLF dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk itu, kita berharap pemberlakuan SLF ditunda atau diberi perpanjangan izin dulu. Hal tersebut dilakukan agar pemilik dapat memperoleh SLF klinik dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan.

Selain itu dalam pelayanan pabean, kami juga selalu responsif. Kebetulan ada yang mengeluh tentang pelayanan pabean kami yang dianggap lambat dan kemudian menelpn kementerian. Kami anggap hal tersebut merupakan masukan yang berharga dan penting, sehingga esok paginya kami lakukan perubahan pelayanan agar pelayanan pabean lebih baik.

Kendala kami juga juga Kabupaten Bekasi belum memiliki Rencan Detil Tata Ruang (RDTR). Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW. Kami sudah mengadu ke Kementerian ATR/BPN. Akan tetapi kementerian meminta revisi RTRW terdahulu. Kami ingin memiliki RDTR agar masyarakat tahu peruntukan ruang sehingga tidak terjadi masalah dalam penggunaan lahan.

Dalam pemberian izin semuanya tidak berbayar, kalau berbayar maka hal tersebut ada regulasinya dan untuk pembayaran melalui perbankan. Kami berharap suatu

saat kami memiliki mall pelayanan agar mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

Tanya Jawab

Dadang S Muchtar

Pemkab Bekasi, masih trauma sehingga belum punya greget dalam pelayanan. Untuk itu Bekasi perlu teamwork yang kuat agar persoalan-persoalan pasca OTT KPK dapat diatasi. Selanjutnya kawasan industri perlu disatukan dalam amdal sehingga tidak mengganggu ekosistem. Sebagai orang yang pernah mengelola Kerawang saya kesal juga. Karena kawasan industri mengganggu Kerawang, mengapa? Karena kawasan industri di sini pembuangan limbahnya ke sungai, sungai tersebut muaranya di Kerawang. Pernah juga ada pengajuan izin pabrik semen yang saya tolak, karena kita pikir akan merusak jalan di Kerawang. Ternyata pabrik itu dapat izin di Kab. Bekasi, dan hanya menyeberangi sebuah jembatan, dan tetap saja melewati melalui jalan di Kerawang.

Henry Yosodiningrat

1. Pelayanan tidak terbatas dengan DPMPSTSP, saya ingin tanya terkait bagaimana pelayanan anak kecil di puskesmas dan pelayanan public lain. Justru saya melihat ORI yang ingin mengawasi pelayanan public, tidak menjamin pengaduan masyarakat tersampaikan dengan baik. Misalnya pelaksanaan atas keputusan pengadilan jaktim yang inkrah yang tidak dilaksanakan, justru ORI ikut larut dalam masalah tersebut sehingga keputusan belum dilaksanakan. Saya khawatir ketika ada keputusan pengadilan yang sudah bersifat tetap, tidak bisa dilaksanakan karena ada pihak lapor ke ORI, tapi ORI justru memperlambat. Untuk itu saya ingin tahu berapa rekomendasi ORI yang telah dibuat dan berapa yang diperhatikan?
2. Selain itu saya ingin tahu masalah ketersediaan pendidikan untuk masyarakat di bekasi?

Sutriyono

1. Kab Bekasi, sedang ada trauma terkait OTT bupati bekasi. Tapi ASN jangan larut segera memberikan pelayanan public yang baik.
2. Sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Adakah dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, karena kesejahteraan itulah amanat sebagai pimpinan.
3. Bagaimana penilaian pelayanan public di Bekasi masuk zona apa?
4. Ketersedian ASN dengan pelayanan public yang dibandingkan dengan daerah lain?

Wa Ode Nur Zainab

Setelah OTT KPK, beberapa bulan kemudian Kab Bekasi mendapatkan penghargaan atas pelayanan public ini sebuah keanehan. Untuk itu saya harapkan para PNS, Ketika Bupati memberikan wewenang pada DPMPTSP. Maka Kepala daerah telah memberikan pendelegasian wewenang, untuk itu tanggungjawab ada pada kepala dinas. Jadi saya harapkan para OPD perlu hati-hati, tidak asal menuruti perintah Kepala Daerah. Kalau diluar wewenang OPD jangan mau tanda tangan.

Sudiro Asno

1. Terkait penutupan atau perpanjangan izin klinik agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan karena pembayaran dari BPJS saja tidak lancar apalagi kalau putus kontrak dengan BPJS tentu menyulitkan klinik-klinik tersebut.
2. Bagaimana mungkin kawasan terbesar di asia tenggara tapi belum punya RDTR. Bukankah aturan tersebut dibuat agar pembangunan teratur. Ini membingungkan dan meragukan saya. Seperti kasus Meikarta izinya 84 ha tapi pelaksanaan lebih dari itu
3. Berapa besar tenaga honorer dalam pelayanan public termasuk dalam pendidikan, apakah sesuai UMR ?
4. Bagaimana pelaksanaan E KTP di bekasi, karena Kemendagri menjamin blangko E KTP tersedia?

Firmasyah Mardanoes

1. Seperti dikatakan bahwa setelah pemberlakuan OSS ada 18000 permohonan, saya pingin tahu klasifikasi permohonan tersebut, apakah dinas teknis tahu hal tersebut?

Tabrani Mamun

1. Ketersediaan SDM dengan 18000 permohonan izin, berapa hari bisa selesai permohonan tersebut?
2. Bagaimana dengan alih fungsi persawahan, saya berharap jangan terlalu banyak. Karena kita tahu Bekasi adalah lumbung sawah selain Kerawang?

Tamanuri

Kami minta Pemkab tidak perlu menjawab semuanya, karena apa yang disampaikan ada yang sifatnya saran, tanggapan dan pertanyaan. Untuk itu kami minta tanggapan dari ORI, kemudian Kementerian ATR/BPN dan diakhiri oleh Pemkab Bekasi.

Jawaban dari Mitra

Dadan Suparjo Suharmawijaya Anggota Ombudsman RI

Pengaduan masyarakat tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima mencapai 6.859. Pada 2016, Ombudsman mencatat jumlah laporan dari masyarakat mencapai 10.153. tahun 2017, Ombudsman menerima 7.999 laporan pengaduan masyarakat

Terkait putusan yang sudah inkrah, kami tentu memiliki kesepakatan bersama, ketika pengaduan tersebut sudah bersifat inkrah di pengadilan, maka hal tersebut tidak akan dibahas di ORI. Memang ada perhatian khusus ketika ada laporan pengaduan tentang keputusan pengadilan inkrah tapi tidak dieksekusi. Khusus yang disampaikan bapak Henry Yoso, kami justru mempertanyakan ke kementerian keuangan sebagai terlapor, mengapa putusan tidak dilakukan, kami klarifikasi mengapa putusan tidak dieksekusi. Dan, beberapa yang kami lakukan sekarang justru menguntungkan masyarakat. Seperti yang kami lakukan di Depok, dengan adanya peran kami maka Pemkot Depok akhirnya menganggarkan ganti rugi dalam APBD.

Secara umum, laporan pengaduan akan cepat kami selesaikan biasanya terkait nyawa manusia dan mata pencaharian. Untuk itu, kami sedang mengembangkan sistem untuk memilah laporan pengaduan, sehingga nantinya kami hanya akan menangani maladministrasi berat saja, sementara itu yang sifatnya pengaduan ringan akan kami salurkan kepada pihak terlapor untuk segera diperbaiki.

Terkait masalah keluhan perizinan klinik kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, kami memiliki pengalaman ketika ada 616 fasilitas kesehatan mau diputus BPJS karena tidak mendapat sertifikasi dari Kemenkes. Maka kami menyurati Menkes agar jangan terjadi pemutusan kerjasama antara BPJS dengan 616 penyedia fasilitas kesehatan. Dan kemudian direspon oleh Menkes, sehingga 512 penyediaan faskes yang tidak terakreditasi tetap dilayani. Untuk itu sebaiknya Pemda mempermudah izin klinik sehingga pelayanan BPJS tetap terlayani sambil menyelesaikan masalah perizinan.

OSS, 2 hari menyetujui. Ada izin yang tidak disetujui pemda, tapi oleh OSS diizinkan. Jadi ada konflik

Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta

Untuk tahun 2018 di wilayah kerja kami di Jabodetabek ada 350 laporan pengaduan dan dapat 180 diselesaikan. Sebenarnya kami ketika berhubungan BPN dan Polri meskipun harus memanggil 5 dan 6 kali, mereka datang dan kooperatif. Justru ketika berhubungan dari pemda, susah. Untuk itu kedepan kami melihat perlu ada koordinasi dengan Kemendagri, sehingga bila ada pemanggilan kepada pemda, maka pemda kooperatif.

Untuk zona kepatuhan, berulang kali Kabupaten Bekasi masuk zona merah, termasuk Kabupaten Bogor. Secara berurutan kedua kabupaten, dua tahun ini masih merah. Dari laporan pengaduan, sebanyak 7% adalah mal admintrasi, makanya kami heran koq Kab. Bekasi mendapat penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB. Karena kami melihat tidak perbaikan pelayanan di Pemkab Bekasi. Memang ada indikasi perbaikan dalam pelayanan, hal tersebut terlihat, ketika kita menyelesaikan sengketa pasar cikarang, Sekda kabupaten Bekasi sangat kooperatif sehingga membantu sengketa di pasar tersebut.

Staf ahli Men ATR/BPN Ir. Bahrum Syah, MSi

Terkait keluhan masalah zonasi lahan dalam RDTR, ketika belum ada RDTR maka acuan utamanya adalah RTRW, hal tersebut penting agar tidak ada kekosongan hukum. Selanjutnya dalam masalah pelayanan publik kami selalu memperbaiki meski dengan OSS belum semua kantor pertanahan kami melaksanakannya karena beberapa kendala teknis operasional. Terkait masalah PTSL, dengan segala kelebihan dan kekurangan maka kami terus menjaga kualitas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan pengaduan yang dilaporkan ke ORI, pengaduan ORI tersebut belum dapat diselesaikan karena kondisi yang mengharuskan seperti itu, akan tetapi kami akan berusaha menyelesaikan sebelum kedaluarsa pelaporan.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi

Kami telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Bekasi untuk memberikan pelayanan yang excelent. Jadi pada dasarnya telah ada kerjasama yang konstruktif dengan Pemkab Bekasi. Selanjutnya tentang OSS yang mensyaratkan adanya RDTR, dimana RDTR Kab Bekasi yang belum terbit, kami meminta kepada Pemkab Bekasi untuk terlebih dahulu merevisi RTRW, apabila revisi tersebut mendapat persetujuan Menteri ATR/BPN. Maka RDTR akan disetujui. Memang persoalan dalam RDTR adalah adanya kontradiksi dengan RTRW provinsi tetangga. Untuk itu perlu sinkronisasi agar tidak terjadi permasalahan. Untuk masalah perizinan yang masuk terkait OSS telah masuk permohonan sebanyak 257, dan dapat diselesaikan sebanyak 110 permohonan izin.



10 PELAYANAN PNBP TERBANYAK TAHUN 2018

NO	JENIS PELAYANAN	MASUK	SELESAI	PROSES
1	Pembuatan Bidang	38.207	13.519	18.588
2	Peralihan Hak - Jual Beli	34.981	29.975	5.006
3	Hak Tanggungan	16.063	14.475	1.588
4	Rozka	14.550	14.245	305
5	Pembaharuan Hak Atas Tanah	11.078	11.068	10
6	Perencanaan Bidang	5.780	2.223	3.557
7	Canti Nama	2.853	2.848	5
8	Hapusnya Hak	1.319	1.113	206
9	Peralihan Hak - Pewarisan	1.206	1.006	200
10	Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengkuan/Pengelasan Hak	1.195	87	1.108



PENGADAAN TANAH

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 2018

- TOL CIBANGSIS - CIBITUNG DR 22**
Kategori: 100% (100% Persepsi 2017) Tanggal: 20 April 2017
Lokasi: Jalan Sunda Baru km. 10, Cibitung
Tipe: Tol
Target: 100 UGR - 100 Bilangan Rp. 1.200 milyar
Realisasi: 100% (100%)
- TOL CIBITUNG - CILINCING DR 72 R01**
Kategori: 100% (100% Persepsi 2017) Tanggal: 20 April 2017
Lokasi: Sunda Baru km. 10, Cibitung
Tipe: Tol
Target: 100 UGR - 100 Bilangan Rp. 1.200 milyar
Realisasi: 100% (100%)
- TRASE KERETA CEPAT (KTC)**
Kategori: 100% (100% Persepsi 2017) Tanggal: 20 September 2017
Lokasi: Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Tipe: Kereta
Target: 100 UGR - 100 Bilangan Rp. 1.200 milyar
Realisasi: 100% (100%)
- SUET (SUKSES)**
Kategori: 100% (100% Persepsi 2017) Tanggal: 20 September 2017
Lokasi: Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Tipe: Kereta
Target: 100 UGR - 100 Bilangan Rp. 1.200 milyar
Realisasi: 100% (100%)
- SERTIFIKASI PASCA PENGADAAN TANAH**
Kategori: 100% (100% Persepsi 2017) Tanggal: 20 September 2017
Lokasi: Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Tipe: Kereta
Target: 100 UGR - 100 Bilangan Rp. 1.200 milyar
Realisasi: 100% (100%)



Pemerintah Kabupaten Bekasi

Dari jumlah pemilih 2.054.000 ada 68.000 ribu yang belum terekam E KTP, dan semua itu akan kami kejar menjelang hari H pencoblosan. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman tapi belum tercetak KTP nya sejumlah 147.835 orang. Setelah kami melakukan koordinasi dengan Kemendagri maka 47.000 akan dicetak oleh pusat, sedangkan sisanya 100 ribuan akan dicetak di Bekasi. Saat ini 24 printer yang ada di kecamatan-kecamatan yang siap mencetak. Dan kami targetkan 100 ribu KTP dapat diselesaikan dalam waktu 19 hari.

III. Penutup

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi Dr. Mardani, MEng. Dan meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan OSS dan KTP EI serta terus meningkatkan profesionalitas ASN dalam pelayanan publik agar masyarakat merasa memiliki negeri ini.